



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF PENGOLAHAN KERUPUK IKAN DI DESA PANGKIL KABUPATEN BINTAN

Iryani¹, Adji Suradji Muhammad², Okparizan³, Rudi Subiyakto⁴, Muhazinar⁵

^{1,5}Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji,

^{2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Corresponding Author: 2000010009@student.umrah.ac.id

Info Artikel

Article History;

Submitted: 14-10-2021

Accepted: 19-10-2021

Published: 01-11-2021

Kata Kunci;

Pemberdayaan Masyarakat; Usaha Ekonomi Produktif; Kerupuk Ikan

Keyword;

Community Empowerment; Bintan Productive Economic Business; Fish Crackers

Abstrak:

Provinsi Kepulauan Riau mempunyai sumber daya alam khususnya bidang perikanan yang sangat potensial. Desa pangkil Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu pulau kecil yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang berada cukup dekat dengan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini semestinya menjadi poin lebih bagi desa pangkil untuk bisa berkembang lebih maju dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mata pencaharian nelayan lebih dari 70% faktanya masih banyak warga desa pangkil yang miskin atau belum tergolong sejahtera. Upaya masyarakat dalam memanfaatkan hasil tangkapan ikan mengolah ikan menjadi kerupuk menjadi salah satu alternative untuk menambah perekonomian keluarga. Hal ini tentu saja masih berharap adanya program pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah guna membantu masyarakat agar lebih mengembangkan usahanya, mandiri, kualitas produksi yang baik sampai memasarkan produk agar mampu bersaing dengan usaha kerupuk ikan lainnya. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bisa menjadi salah satu upaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan agar warga desa Pangkil juga dapat menerima manfaat yang optimal dari UEP sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga warga nelayan Desa Pangkil. Tujuan penelitian ini adalah untuk memotivasi masyarakat dan Pemerintah desa agar lebih optimal memanfaatkan sumber daya yang ada dan memanfaatkan program pemerintah yang ada untuk dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan warga desa Pangkil.

Abstract:

Riau Islands Province has natural resources, especially in the fisheries sector, which is very potential. Pangkil Village, Teluk Bintan District, Bintan Regency, Riau Islands Province is one of the small islands in the Riau Archipelago Province which is quite close to the capital city of the Riau Islands Province. This should be an additional point for Pangkil Village to be able to develop more advanced and improve the welfare of the community. With a fisherman's livelihood of more than 70%, the fact is that there are still many Pangkil villagers who are poor or not yet classified as prosperous. Community efforts in utilizing fish catches, processing fish into crackers are an alternative to increase the family economy. This of course still hopes for a community empowerment program by the Government to help the community to further develop their business, be independent, have good production quality and market their products to be able to compete with other fish cracker businesses. Productive Economic Business Assistance can be one of the efforts in accordance with the needs of the community. It is hoped that the residents of Pangkil village can also receive optimal benefits from the UEP so that they can improve the economy of the families of fishermen in Pangkil Village. The purpose of this research is to motivate the community and the village government to make more optimal use of existing resources and utilize existing government programs to be utilized to improve the welfare of Pangkil villagers.

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi dengan letak geografis yang strategis pada lokasi perikanan, serta didukung dengan kondisi alam yang sangat potensial, Provinsi Kepulauan Riau sangat memungkinkan mengembangkan investasi terutama dalam bidang Perikanan dan Kelautan. Kabupaten Bintan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang terletak antara 000' Lintang Utara 1020' Lintang Selatan dan 104000' 108030 Bujur Timur dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatra dengan pesisir pantai berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan termasuk dalam daerah pertumbuhan ekonomi (Growth Triangle). (Muhammad Raqib:201)

Secara geografi desa Pangkil adalah merupakan desa di wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan luas daratan \pm 22.5 Km² dan luas wilayah keseluruhan 1050 Km². Desa Pangkil memiliki batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengujan, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Dompok, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Karas dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sembulang. Desa Pangkil merupakan penghasil sektor perikanan dengan jumlah penduduk pada awal tahun 2020 berjumlah 1.396 jiwa dan terdiri dari 427 KK. (Profil Desa Pangkil:2020)

Sebagian besar penduduk desa Pangkil bermata pencarian nelayan, selengkapnya data mata pencaharian masyarakat sebagai berikut :

Tabel 1. Mata Pencarian masyarakat Desa Pangkil

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Ket.
1	Nelayan	306 Orang	
2	Buruh	17 Orang	
3	Pedagang	38 Orang	
4.	Guru PNS/ NON PNS	15 - 19 Orang	
5.	Lain-lain	27 Orang	
6	Jumlah	422 Orang	

Sumber: Profil Desa Pangkil 2020

Berdasarkan data yang didapatkan masyarakat miskin desa Pangkil berjumlah 38 KK, hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya membantu menangani masalah kemiskinan tersebut. Dalam hal ini Pemberdayaan Masyarakat menjadi salah satu faktor yang penting. Menurut Kiki Endah (2020) permasalahan yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat : menggali potensi lokal desa dimana a) masih terdapat keengganan masyarakat untuk diberdayakan dalam perbaikan kehidupan sosial ekonomi; b) masih belum berjalan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. (Kiki Endah:2020)

Menurut I Nyoman Bharata Masyarakat desa baik sebagai orang perorang maupun kelompok haruslah memahami arti penting serta manfaat untuk membangun diri, dengan mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya maupun lingkungannya, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik. Sebagai suatu proses kemandirian mengandung segi-segi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan sehingga dengan demikian meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat (Kiki Endah :2020)

Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya (Muhammad Raqib:2016).

Sumber kekayaan alam yang besar selayaknya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, pengolahan kerupuk ikan salah satunya dapat menjadi tambahan sumber pendapatan bagi

masyarakat Desa Pangkil. Namun pengolahan kerupuk ikan selama ini masih dilakukan secara mandiri dengan proses dan peralatan manual dan tradisional, pengemasan dan pemasaran juga belum optimal. Perubahan musim dan kondisi angin juga mempengaruhi jenis tangkapan yang diusahakan nelayan desa pangkil. Upaya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah salah satunya seperti bantuan Usaha Ekonomi Produktif sangat diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan yang ada di desa Pangkil.

Adapun tujuan penelitian atas kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yaitu memberikan motivasi kepada masyarakat bagaimana mengoptimalkan semua potensi yang ada untuk menangani masalah kemiskinan serta agar pemerintah setempat juga lebih mengupayakan langkah langkah yang harus diambil salah satunya dengan mengupayakan bantuan UEP dari pemerintah bagi warga miskin desa Pangkil.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan September sampai dengan Oktober 2021 bertempat di Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, Desa pangkil memiliki potensi hasil pengolahan ikan salah satunya kerupuk ikan yang sudah cukup dikenal di Kabupaten Bintang khususnya.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. dimana menurut Nasution (2003:18) penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Karena sifat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan bersifat natural atau wajar sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kajian pustaka dari beberapa sumber literatur dalam melihat permasalahan yang diteliti (Kiki Endah:2020).

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang terdiri dari Sekretaris Desa , salah satu ketua ketua RT, selebihnya nelayan dan istri nelayan. Penulis juga melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi serta melakukan wawancara kepada beberapa informan tersebut juga masyarakat desa setempat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang –undang Nomor. 6 Tahun 2014 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan memang sebuah proses. Akan tetapi dari proses tersebut dapat dilihat dengan indikator-indikator yang menyertai proses pemberdayaan menuju sebuah keberhasilan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberhasilan yang dapat menunjukkan seseorang atau komunitas berdaya atau tidak. Dengan cara ini kita dapat melihat ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. (Arif Purbantara:2019)

Program pemberdayaan menjadi salah satu konsep dalam upaya memberikan peran tanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan pekerjaan dan kegiatan. Pemberdayaan akan dianggap sukses jika lakuka secara terkonsep dan terstruktur baik oleh pemerintah, pemimpin, pengusaha maupun kelompok dengan membangunkan budaya kerja yang baik. Konsep program pemberdayaan erat kaitannya dengan arti membangun masyarakat dengan upaya memberikan tanggungjawab yang besar dan bertumpu pada mereka.(Syaiful Anwar:2020)

Kemiskinan di wilayah pesisir, pulau pulau kecil disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia, serta belum tersedianya insrastruktur. Faktor kemiskinan tersebut mengakibatkan ketertinggalan masyarakat dalam mengelola berbagai kegiatan usaha ekonomi. (Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan stimulan UEP,RS-RTLH dan SARLING Kemensos:2016)

Sebagaimana dalam pasal 23 UU No.13 Tahun 2011 upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui: (a). penyediaan sumber mata pencaharian dibidang perikanan dan sumber data laut; (b). bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha; (c). penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan; (d). pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau (e). peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir. Pada pasal 28 UU No.13 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, Pemerintah bertugas: (a). memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin;(b). memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin;(c). mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin;(d). mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin;(e). menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin; dan (f). mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin. Adapun pada pasal 29 UU No.13 Tahun 2011 dibunyikan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU No.13 Tahun 2011, Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.

Direktorat Penanganan Fakir Miskin dan Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara telah menetapkan kegiatan penanganan fakir miskin, kegiatan penanganan fakir miskin salah satunya dalam bentuk pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif. .(Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan stimulant UEP,RS-RTLH dan SARLING Kemensos:2016)

Hasil tangkapan nelayan desa pangkil pada umumnya diutamakan adalah hewan laut jenis udang dengan kualitas ekspor. Cara penangkapannya juga dilakukan secara tradisional menggunakan jaring secara manual atau biasa disebut nelayan setempat dengan jaring udang. Hasil tangkapanpun tidak hanya udang, namun ada beberapa jenis hewan laut seperti kepiting, cumi dan ikan. Jumlah ikan yang didapat selalunya lebih banyak presentasenya dengan jenis ikan beragam. Jika ikan-ikan tersebut di jual, harganya relative murah. Disinilah asal mulanya ide pembuatan kerupuk ikan desa Pangkil yang secara turun temurun di wariskan dari generasi ke generasi yang menjadi tambahan sumber penghasilan ekonomi keluarga nelayan desa pangkil yang bermata pencaharian nelayan udang.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah. Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tentu mempunyai penanan penting . beberapa sasaran yang ingin di capai dalam bantuan UEP meliputi :

1. Pemberian bantuan sosial yang meliputi pengembangan potensi diri.
2. Melakukan pendampingan social dalam rangka meningkatkan keterampilan penerima bantuan.
3. Mengembangkan kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, organisasi sosial dan perguruan tinggi dalam rangka pengelolaan UEP.

Bantuan UEP merupakan salah satu akses bagi masyarakat untuk menjadi kesempatan membangun usaha dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Pengelolaan bantuan UEP didasarkan pada kebutuhan dan keterampilan yang dimiliki calon penerima bantuan dan tentunya dengan semangat dan keinginan untuk malukan usaha produktif.

Tujuan pelaksanaan bantuan stimulant UEP yaitu:

1. Pemberian modal usaha penerima bantuan stimulant UEP
2. Memberikan aksesibilitas pngembangan usaha yang dimiliki.
3. Menambah pendapatan/ penghasilan keluarga penerima bantuan UEP.
4. Membangun kemandirian usaha penerima bantuan UEP.
5. Meningkatkan hubungan social yang semakin harmonis di dala keluarga.

Adapun Kreteria Penerima Bantuan sebagai berikut:

1. Masyarakat miskin yang terdaftar di Basis Data Terpadu(BDT) pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kessos), Kementerian Sosial RI.
2. Masyarakat miskin yang sudah maupun belum pernah mendapatkan bantuan lain dari pemerintah seperti PKH, KIS, KIP, Rastra maupun KPS.
3. Memiliki KTP/KK/Surat Keterangan Domisili.

4. Masyarakat yang memiliki keinginan berusaha dan belum pernah mendapat bantuan stimulan usaha serta memiliki potensi dan keterampilan dalam melaksanakan UEP
5. Usia Produktif 18 – 60 Tahun.
6. Masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam BDT tetapi masuk dalam kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu mrngacu pada permensos 146 tahun 2013.

Jenis usaha calon penerima bantuan UEP antara lain : perikanan, jasa, industri rumah tangga, peternakan, pertanian/perkebunan dan perdagangan. (Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan stimulant UEP,RS-RTLH dan SARLING Kemensos:2016)

Pengolahan Kerupuk ikan adalah suatu usaha merubah bentuk ikan menjadi berbagai macam produk pangan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh konsumen sebagai bahan makanan. Menurut terminology FAO, ikan olahan tradisional, atau Traditional Curred adalah produk yang diolah secara sederhana dan umumnya dilakukan pada skala industri rumah tangga. Jenis olahan yang termasuk produk olahan tradisional ini adalah ikan kering, ikan asin kering, ikan pindang, ikan asap, serta produk fermentasi yaitu kecap, terasi, kerupuk, nugget dan sejenisnya (Hadiwiyanto, 2010 dalam Husni Arifin:2018).

Usaha pengolahan kerupuk ikan yang ada di desa pangkil sudah selayaknya mendapatkan perhatian pemerintah salah satunya dengan bantuan stimulant EUP karena sudah memenuhi kriteria penerima bantuan. Dalam pengolahan Kerupuk ikan khas desa pangkil Bahan bahan yang sederhana dengan komposisi tepung sagu dan ikan segar yang sudah dihaluskan masing masing 50%, serta tanpa bahan pengawet sehingga sangat aman. Hal ini tentunya menjadi nilai tambah dan menjadi kekhasan rasa kerupuk ikan desa pangkil

Proses pembuatan kerupuk ikan selama ini dilakukan oleh istri-istri nelayan dalam upaya menambah perekomoian keluarga. Dalam pengamatan penulis, prosesnya dibuat dengan manual mulai dari proses memisahkan daging ikan dengan tulang, proses pengadonan sampai pengirisan kerupuk mentah. Sehingga kualitas kerupuk tidak sama antara satu pengolah dengan pengolah lainnya. Bahkan kerupuk hasil produksi tidak sama walau di buat dengan pengolah yang sama. Teknik yang secara manual menjadi suatu kelemahan, missal dalam hal lamanya waktu pengukusan, tingkat suhu panas api maupun keadaan cuaca sangat berpengaruh. Saat musim panas tentu kualitas kerupuk lebih baik karena lebih cepat kering, sementara jika musim hujan kualitas tentu sedikit berbeda karena saat pengeringan atau penjemuran tidak mempunyai panas matahari yang mencukupi.

Dengan adanya program pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten maupun Provinsi melalui Bantuan stimulant UEP diharapkan dapat membantu warga masyarakat yang menekuni industry rumahan pengolahan kerupuk ikan. Dana Bantuan dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas dan jumlah produksi misalnya dengan mengadakan mesin penggiling ikan, mesin pengadon, alat pengiris maupun oven untuk menjemur kerupuk mentah jika musim hujan tiba.

Kesadaran masyakat untuk melakukan usaha optimal dan memanfaatkan segala potensi juga harus selalu ditanamkan dan di pupuk. Dalam hal ini dirasa perlu adanya pendampingan setelah bantuan UEP disalurkan. Prosedur untuk mendapatkan dana bantuan UEP langkah awalnya adalah adanya usulan dari Dinas Sosial Kabupaten. Usulan ini tentu saja mengacu pada usulan dari pemerintah desa setempat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur maupun langkah yang harus diambil menjadi salah satu hal penting yang harus ditangani khususnya pemerintahan desa. Perlunya sosialisasi serta motivasi agar masyarakat miskin yang ingin melakukan usaha agar mau mengusulkan diri ke pemerintah desa untuk didaftarkan sebagai calon penerima bantuan, serta mengedukasi masyarakat agar mempertanggungjawabkan bantuan tersebut untuk tidak digunakan secara konsumtif belaka.

Dari hasil wawancara dan survey lapangan di dapati bahwa warga desa pangkil belum pernah terdaftar atau menerima bantuan UEP dari pemerintah. Hal ini sangat disayangkan karena program pemerintah yang sudah dibuat belum bisa bermanfaat bagi warga desa Pangkil.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari peranan pemerintah desa sebagai lembaga pemerintah tingkat paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Menyampaikan aspirasi masyarakat, memberikan pembinaan dan sosialisasi jika ada program program pemerintah terkait penanganan kemiskinan salah satunya. Pemerintahan desa memberikan kontribusi utama dalam pendataan untuk selanjutnya diteruskan ke kabupaten. Sehingga tidak ada yang terlewatkan saat pendaatn Basis data terpadu atau data sejenis lainnya.
2. Program pemerintah berupa bantuan EUP merupakan program yang harus didukung dan dilaksanakan dengan baik, pendataan penerima bantuan idealnya dilakukan dengan prosedur tidak hanya usulan dari pemerintah kabupaten, namun juga bisa melaui jalur yang berbeda dimana masyarakat bisa mengakses atau mendaftar secara langsung untuk langkah awal pendataan, missal mendaftaran secara online.
3. UEP juga tidak terlepas dari pendampingan sehingga dana yang diberikan dapat berguna benar benar untuk pengembangan usaha, serta pemerintah juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi dan penjualan yang lebih baik.
4. Pemerintah harus berusaha mengedukasi masyarakat untuk lebih memaksimalkan segala potensi diri dan potensi sumber kekayaan alam yang ada untuk digunakan sebaiknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP UMRAH, Narasumber serta peserta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Arifin, "STUDI PROGRAM PEMBERDAYAAN ISTRI NELAYAN TERHADAP KEADAAN USAHA PENGOLAHAN KERUPUK IKAN DESA BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU," 2018.
- N. Sunarti, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desia Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran."
- B. H. Syaiful Anwar, "PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN KALIANGET," *J. ABDIMAS SOSEK*, 2020.
- K. Endah, "Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa," *Moderat J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 6, no. 1, pp. 135–143, 2020.
- A. P. Mujiyanto, "Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Pemberdaya. Masy.*, vol. I, no. 2, pp. 1–20, 2019.
- S. O. Kossasy, "Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat," vol. 01, no. 01, pp. 21–26, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*
- Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.*
- K. S. RI, *Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif(UEP) Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Hunil (RS-RTLH) dan Sarana Lingkungan (SARLING)*. 2016.
- Kepala Desa Pangkil Yahya, *Profile Desa Pangkil*. 2020.